

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2019**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada Rencana Kinerja Pemerintah dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

RKT disusun dari program kegiatan DLHK selama setahun sesuai dengan pagu indikatif yang diperoleh. Sejalan dengan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan di dalam RENJA harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, sehingga RKT dapat menggambarkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Dengan tersusunnya RKT DLHK tahun 2019 diharapkan mampu mendukung terlaksananya kegiatan pengelolaan lingkungan secara efisien dan efektif melalui koordinasi kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan.

Penyusunan RKT Tahun 2019 ini, disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menyusun RKT ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, maka sangat diharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, terima kasih.

Tenggarong, 23 Pebruari 2019
Pj. Kepala,

ALFIAN NOOR, S.E
NIP. 19690113 199503 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya setiap Tahun Anggaran dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka peranan Renstra yang dijabarkan setiap tahun dalam bentuk RKT ini menjadi sangat penting.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perencanaan tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun sebagai wujud komitmen jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam RKT ini, maka dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada

Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), sama halnya dengan jabatan eselon II juga wajib menyusunnya melalui sumberdaya yang tersedia, berupaya menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan guna mewujudkan *Good Governance*.

Dalam masa satu tahun, sebagai salah satu Pejabat Eselon II di bawah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Tujuan Penyusunan RKT Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan dalam satu tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dan sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini menjabarkan RENSTRA ke dalam RENJA periode tahunan.

Dengan demikian RKT Tahun 2019 dapat digunakan sebagai Rencana capaian Kinerja Tahunan DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2018. Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BLHD 2016 – 2021 melalui berbagai kegiatan tahunan.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RKT disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari RENSTRA yang memuat informasi tentang : (a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (c) program; (d) kegiatan; (e) indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

A. Rencana Kerja Tahunan Program dan Kegiatan

Uraian				Target Kinerja	
NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	RENSTRA 5 Tahun	RENJA 2018
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang yang memadai (1)			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya, air, dan listrik	4 rekening	4 rekening
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Kendaraan	23 Kendaraan
3	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Jasa Teknis Keuangan	12 Bulan	12 Bulan
4	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya perlengkapan alat tulis kantor	12 Bulan	52 (lima puluh dua) jenis alat tulis kantor
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran	200 lampu & batrai	112 pcs
6	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000 exp	2.500 exp
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Kebersihan Kantor	12 Unit	16 Unit
8	Penyediaan makan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minumam Pegawai, rapat dan Tamu	14 porsi dan jenis	200Porsi
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		Tersedianya Jasa Teknis Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	80 jenis	16.667 Lembar
11	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam		Tecapainya Koordinasi dan	30 kali perjalanan	21 kali perjalanan

	dan keluar daerah		Konsultasi Program dan Kegiatan DLHK	Dinas	Dinas
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terlaksananya Hasil Pemeliharaan	10 jenis	1 Unit
III	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				
13	Pendidikan dan Pelatihan formal Analisis Laboratorium dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan kualitas pengawasan di bidang Lingkungan Hidup	20 Orang	19 Orang
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
14	Penyusunan laporan Keuangan semesteran		Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, demokratis, jujur dan bertanggung jawab dan akutabel	25 Dokumen	5 Dokumen
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja serta Monev		Tersedianya Dokumen (Renstra, Renja, LKJIP, LPPD, dan Monev SKPD)	10 Dokumen	3 Dokumen
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (DAK 2018)		Tersedianya Sarana Pengelolaan Bank sampah	100 %	100 %
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (Pendamping)		Terlaksananya pendamping kegiatan sarana dan prasarana pengurangan dan pengendalian beban pencemaran dari limbah cair dan sampah	100%	100%
18	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah Produsen/ Industri		Menjaga agar kebijakan yang sedang di implementasikan esuai dengan tujuan dan sasaran	60 pelaku	60 pelaku
19	Workshop Pengelolaan Bank Sampah		Terwujudnya pemahaman tentang lingkungan hidup kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar	100 orang peserta workshop	100 orang peserta workshop
20	Pembinaan Pengurangan Sampah		Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran	5 kecamatan	5 kecamatan
V	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				

21	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Penurunan beban pencemaran dan kerusakan LH (2)	Terlaksananya kegiatan properda dan propernas bagi perusahaan tambang batubara/Migas/Sawit/Industri dan Jasa/HTI	300 Perusahaan	95 Perusahaan
22	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup		Terpenuhinya standar ISO 17025	1 paket alat laboratorium dan reagen	13 Parameter
23	Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata		Terwujudnya pemahaman tentang lingkungan hidup serta sekolah yang berwawasan lingkungan	25 sekolah adiwiyata	25 sekolah adiwiyata
24	Inventarisasi Usaha/ Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3		Database penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) skala menengah kebawah	200 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha
25	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/ Usaha (Amdal, UKL-UKP dan SPPL) di Kabupaten Kutai Kartanegara		Terkendalinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha
26	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		Penyusunan dokumen lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	130 dokumen ijin lingkungan	130 dokumen ijin lingkungan
27	Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) penerapan sanksi administratif		Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai rekomendasi dan ijin lingkungan	10 jumlah pengaduan	10 jumlah pengaduan
28	Pemantauan Kualitas Udara, Air Permukaan dan Tanah		Terkendalinya pencemaran sungai	5 kecamatan	5 kecamatan
29	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan		Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan rekomendasi dan ijin lingkungan	40 laporan	50 Pelaku usaha dan perusahaan
VI	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				
30	Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup (KALPATARU)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan lingkungan	30 peserta	5 Calon Penghargaan	
VII	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup				
31	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan	100 kasus	85%	

32	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten		Tersedianya dokumen status lingkungan hidup daerah dan dokumen daya dukung dan daya tamping Kab.Kukar	1 Dokumen	2 Dokumen
33	Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online		Terpublikasinya Event Daerah melalui media cetak dan online	48 Media cetak	48 Media cetak
VIII	Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
34	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat		Peningkatan Perencanaan dan laporan serta terlakasnya pengawasannya dan evaluasi program DLHK Kab.Kukar	30 kali	2 Dokumen
IX	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan				
35	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut		Tersedianya dokumen data kerusakan ekosistem perairan darat, pesisir dan laut	4 Kecamatan	8 Kecamatan
36	Penilaian Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Program		Menurunnya emisi gas rumah kaca	18 kecamatan	50 Desa
	Program Rehabilitasi Lahan Kritis				
37	Pemeliharaan DAS atas IPPHK an. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		Tercapainya reahabilitasi Lahan Kritis	14.883 Bibit	14.883 Bibit

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun berdasarkan Perencanaan Strategik dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut tidak lepas dari pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Renja Tahun 2019 tidak semua program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategik dapat dilaksanakan karena mempertimbangkan proritas atau kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan serta mempertimbangkan keterbatasan dana yang tersedia.

Meskipun RKT ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak menemui permasalahan dan hambatan, untuk hal tersebut masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya.

Dengan tersusunnya RKT ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang dicapai pada tahun 2019 dan bermanfaat sebagai dasar penjabaran dari pelaksanaan TUPOKSI, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan dapat dipahami seluruh pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.